

Bupati Samosir Ikuti Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Republik Indonesia Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78

Karmel - SAMOSIR.PUBLIKSUMUT.COM

Aug 16, 2023 - 22:06



SAMOSIR-Bupati Samosir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Sidang Bersama DPR - DPD RI dalam rangka peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023, yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Rabu (16/8/2023).

Rapat paripurna ini diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Bupati Samosir, jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Camat, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Tokoh Pemrakarsa

Pembentukan Kabupaten Samosir, Mantan Bupati Samosir, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Setelah dibuka oleh Ketua DPRD Samosir Sorta E. Siahaan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2023, langsung dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, yang ditayangkan langsung secara virtual menggunakan layar lebar.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2023 dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan menyampaikan pidato pengantar sidang, dan dilanjutkan dengan mempesilahkan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti untuk memimpin sidang bersama.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Tanimbar, Maluku, dalam pidato kenegaraannya menyampaikan saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang trend di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya Capres-Cawapresnya, jawabannya 'Belum ada arahan Pak Lurah'.

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu, ternyata saya", kata Jokowi sembari mengatakan bahwa dirinya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pimpinan parpol yang memiliki wewenang menentukan capres dan cawapres.

Saat ini, kata Jokowi dengan adanya media sosial seperti sekarang, apapun bisa disampaikan ke Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggirian sampai kemarahan, ejekan, bahkan, makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan. "Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya nda papa, sebagai pribadi, saya menerima saja".

"Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang..?", katanya.

Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Namun Jokowi mengajak agar seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Jokowi, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan bahkan strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif yang menjadi kunci peningkatan produktivitas nasional.

Momentum Presidensi Indonesia dalam G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan

serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan ditengah kondisi dunia yg bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan dengan strategi pertama mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 % di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 % 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp 3.212 T dari tahun 2015 – 2023, termasuk didalamnya KIS, KIP, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, juga dilakukan upaya re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Presiden Jokowi menegaskan kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu akan membuat menjadi bangsa pemalas. "Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi", tegasnya.

Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia di 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya pemeratakan ekonomi dengan dana desa yang digelontorkan, total mencapai Rp. 539 T dari tahun 2015 s.d 2023.

Oleh karenanya, Presiden menegaskan kepemimpinan kedepan sangat menentukan masa depan Indonesia. "Bukan tentang siapa yang jadi presidennya, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?, karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas", tegas Jokowi.

Diakhir pidatonya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat. Kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan. Kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, & TNI-Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Juga kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, & Lembaga nasional lainnya, yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

"Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia Maju, Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!", tutup Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.